

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan pada bagian pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kinerja anggaran belanja yang dilihat dari varians belanja pada Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja sudah dapat dikatakan baik, karena adanya penghematan anggaran. Hal ini berarti bahwa realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja sehingga dapat dikategorikan baik.
- b. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja diketahui bahwa pertumbuhan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT pada tahun 2020 pertumbuhan belanja bernilai positif dengan presentase sebesar 1,62%. Hal ini berarti Bappelitbangda Provinsi NTT telah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan jumlah realisasi belanja. Sementara itu, persentase pertumbuhan belanja pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 0,69% dan 0,12%. Hal ini disebabkan oleh realisasi anggaran belanja mengalami penurunan secara signifikan, hal ini terjadi karena anggaran belanja juga mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti

bahwa pada tahun tersebut Bappelitbangda belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

- c. Berdasarkan analisis keserasian belanja yaitu rasio belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja. Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran pada belanja operasi cenderung lebih besar dibandingkan pada belanja modal. Sehingga, penggunaan anggaran untuk belanja modal relatif lebih sedikit.
- d. Berdasarkan rasio efisiensi belanja secara keseluruhan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan adanya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah karena tidak melebihi dari 100% .

Pada tahun 2019 menunjukkan tingkat efisien penggunaan belanja adalah sebesar 95,26%, maka termasuk dalam kategori kurang efisien. Kemudian pada tahun 2020 menunjukkan tingkat efisien penggunaan anggaran sebesar 86,17%, maka termasuk dalam kategori cukup efisien sama halnya pada tahun 2021 menunjukkan tingkat efisien pengguna anggaran sebesar 82,21% maka termasuk dalam kategori cukup efisien. Pada tahun 2022 menunjukkan tingkat efisien penggunaan anggaran sebesar 77,40% maka termasuk dalam kategori efisien.

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT harus mempertahankan kinerja anggaran belanja yang sudah baik, karena tidak ada realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja.
- b. Dalam hal keserasian belanja pada Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT sebaiknya juga meningkatkan penggunaan anggaran terhadap belanja modal. Karena belanja modal digunakan untuk aset-aset tetap yang berguna dalam jangka panjang dan memberikan manfaat dimasa yang akan datang.
- c. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, dan hendaknya menambah tahun yang digunakan dan menganalisis keseluruhan anggaran belanja sehingga dapat memperoleh hasil yang lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Halim, A., dan Kusufi, M.S. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Haryanto. (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: Badan Penerbit.
- Hera Purwaningsih (2021) *Analisis Anggaran Belanja untuk Menilai Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral*.,Provinsi Jawa Tengah.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*,Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 03 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas*. Fokusindo Mandiri: Bandung.
- Pilat, J. J. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2016*. Jurnal Accountability, 46.
- Sartika, Dewi. (2018), *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatra Barat*. Skripsi:Univeritas Islam Negeri Sumatra Utara: Medan
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep Aplikasi*.Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tantri, S. N., & Irmawati, P. 2018. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas kebudayaan Daerah Istimewah Yogyakarta Tahun 2012–2016*. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol. 1(1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Yuwono, S. (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.